



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
UNIT KERJA : STAF KHUSUS

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MOHAMAD IKHSAN**
2. Jabatan : **STAF KHUSUS 1**
3. NHK : **17887**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 8.125.875.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 575 m2/408 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 5.948.175.000
2. Tanah Seluas 860 m2 di KAB / KOTA PIDIE JAYA, HASIL SENDIRI Rp. 94.500.000
3. Tanah Seluas 2282 m2 di KAB / KOTA PIDIE JAYA, WARISAN Rp. 236.250.000
4. Tanah Seluas 9781 m2 di KAB / KOTA PIDIE JAYA, WARISAN Rp. 1.018.500.000
5. Tanah Seluas 2255 m2 di KAB / KOTA PIDIE JAYA, WARISAN Rp. 141.750.000
6. Tanah Seluas 3298 m2 di KAB / KOTA PIDIE JAYA, HASIL SENDIRI Rp. 346.500.000
7. Tanah Seluas 1778 m2 di KAB / KOTA PIDIE JAYA, HASIL SENDIRI Rp. 207.900.000
8. Tanah Seluas 1692 m2 di KAB / KOTA PIDIE JAYA, HASIL SENDIRI Rp. 132.300.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 1.042.050.000**

1. MOBIL, TOYOTA YARIS 1.5 SCVT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 187.050.000
2. MOBIL, TOYOTA VOXY 2.0 AT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 315.000.000



3. MOBIL, TOYOTA CAMRY 2.0 HYBRID Tahun 2019, HASIL
SENDIRI Rp. 540.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	1.390.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	11.627.698.299
F. HARTA LAINNYA	Rp.	13.813.604.196
Sub Total	Rp.	35.999.227.495
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	35.999.227.495

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.